

# **PIDATO KENEGARAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**SOEHARTO**

**DI DEPAN SIDANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
16 AGUSTUS 1983**

**REPUBLIK INDONESIA**





*Presiden Republik Indonesia  
Soeharto*





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Para hadirin yang berbahagia;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Besok, tanggal 17 Agustus 1983, Insya Allah, kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita.

Tiga puluh delapan tahun yang lalu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah kalimat-kalimat sederhana dan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dalam kesederhanaannya itu terkandung makna yang dalam.

Kalimat-kalimat yang mengandung pesan yang penuh keagungan dan keluhuran itu lah yang saat ini menyentuh dasar yang paling dalam dari lubuk hati kita, pada saat-saat kita memperingati hari yang paling bersejarah dalam kehidupan bangsa kita.

Merenungkan kembali kalimat-kalimat Pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, hati kita terasa bergetar. Semangat kita terasa berkobar. Kita teringat kembali perjuangan dan pengorbanan yang sangat panjang dari rakyat Indonesia, di bawah pemimpin-pemimpin yang berani, melawan penjajahan semenjak mereka menjejakkan kaki di bumi Nusantara ini.

Kita teringat kembali lautan Sang Merah Putih yang melambai-lambai di mana-mana dari ujung ke ujung Tanah Air ini menyambut Indonesia Merdeka di tahun '45, melambangkan tekad kemerdekaan dan semangat kebangsaan.

Kita teringat kembali gelombang demi gelombang pejuang kemerdekaan, dengan senjata sederhana, menyerbu kubu-kubu

musuh dengan semboyan : merdeka atau mati. Tidak sedikit mereka gugur di medan laga, demi kehormatan kita yang hidup sekarang dalam suasana merdeka.

Karena itu, setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, kita tidak henti-hentinya menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengorbanan dari para Pahlawan Kemerdekaan kita yang berasal dari semua lapisan, semua golongan dan semua generasi yang puseranya tersebar menghiasi seluruh Tanah Air.

Perjuangan itu akhirnya berhasil karena kita bersatu padu mempertahankan dan menegakkan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang berdasarkan . Pancasila. Dengan tujuan tunggal menjaga Kemerdekaan Nasional itu kita tidak pernah mempersoalkan suku bangsa, asal usul, pangkat, kekayaan, agama yang dipeluk di antara kita yang berjuang bersama untuk satu tujuan besar.

Semangat persatuan dan kesatuan yang demikian itu lah yang akan terus kita perkuat untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan dalam zaman pembangunan lahir batin sekarang ini.

Sekarang, tiga puluh delapan tahun setelah Indonesia Merdeka, perjalanan kita sebagai bangsa dan negara telah makin jauh. Jalan yang kita tempuh tidak selamanya lapang. Tidak sedikit bukit yang kita daki, banyak lembah yang kita turuni, tidak kurang-kurang sungai telah kita seberangi. Dalam perjalanan yang panjang itu tubuh kita kadang-kadang mengalami luka-luka. Namun kita tidak merasa lelah, karena kita adalah bangsa pejuang. Kita juga tidak pernah menyerah karena kita tahu tujuan kita adalah masyarakat yang indah.

Kita makin kuat, kita makin banyak pengalaman dan kita makin dewasa.

Namun kita menyadari bahwa perjalanan kita sebagai bangsa dan negara masih akan panjang. Perjalanan itu menuntut kekuatan baru dari kita semua.

Karena itu, setiap kali kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan kita perlu menyegarkan, memperdalam dan memperbaharui kesadaran mengenai : keadaan kita sebagai bangsa dan negara sekarang ini, dari mana kah kita telah berangkat dan ke arah mana kah kita akan melanjutkan perjalanan.

Tahun ini Hari Proklamasi Kemerdekaan kita peringati lima bulan setelah Sidang Umum MPR dalam suasana kegembiraan yang besar dan suasana persaudaraan yang akrab. Sebabnya ialah karena semua keputusan Majelis yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat itu telah dapat diambil dengan hati yang ikhlas, pikiran yang bulat serta semangat persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh.

Karena itu dengan hati yang ikhlas, pikiran yang bulat serta persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh pula saya mengajak semua lapisan, semua kalangan dan semua generasi bangsa kita untuk melaksanakan semua keputusan MPR itu sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Hal itu bertambah penting karena tahun-tahun yang akan datang kita menghadapi pekerjaan yang besar, sedangkan ujian yang harus kita lalui adalah ujian yang berat.

Pekerjaan kita sangat besar karena kita harus segera menyusun Repelita IV dan mulai melaksanakannya tahun depan.

Dalam pada itu tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan tanggung jawab terhadap kejayaan bangsa kita di masa datang mengharuskan kita menyusun Repelita IV dengan jangkauan pandangan yang jauh ke depan, melampaui kurun waktu lima tahun mendatang.

Setidak-tidaknya ada dua alasan yang mengharuskan kita memiliki wawasan yang jauh itu.

Alasan pertama adalah arah pembangunan yang ditetapkan oleh GBHN sendiri. Di sana ditegaskan bahwa dalam Repelita IV kita harus mengusahakan percepatan tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang dengan mengusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa ini untuk tumbuh dan berkembang



dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, kerangka landasan yang kita ciptakan dalam Repelita IV tadi akan kita mantapkan dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI kita dapat tinggal landas menuju masyarakat yang kita cita-citakan ialah masyarakat makmur berkeadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti kerangka landasan yang akan kita ciptakan dalam Repelita IV akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat Indonesia menjelang berakhirnya abad ke-20 nanti dan dengan landasan itu lah bangsa kita akan memasuki abad ke-21.

Alasan kedua adalah bahwa dengan Repelita IV maka Angkatan '45 akan makin mendekati perampungan tugas historisnya. Ini berarti bahwa kerangka landasan yang akan kita ciptakan dalam Repelita IV nanti akan ikut menentukan apakah Angkatan '45 sebagai Generasi Pembebas telah berhasil dalam menjalankan tugas historisnya sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap generasi-generasi selanjutnya dan terhadap sejarah bangsanya.

Angkatan '45 telah bertekad menjadi Generasi Pembebas yang sukses. Angkatan '45 telah bertekad tidak meninggalkan masalah-masalah pelik yang membahayakan Generasi Penerus dan generasi-generasi selanjutnya. Tekad ini harus dihayati oleh setiap unsur Angkatan '45 yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan hasrat untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa yang kita tegakkan, kita pertahankan, kita bangun dan kita cintai bersama untuk kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh generasi-generasi anak cucu kita.

Sama halnya dengan semua generasi dan setiap angkatan, maka Angkatan '45 terdiri dari manusia-manusia biasa yang tidak bebas dari kelemahan dan kekurangan. Namun dengan segala kekurangan dan kelemahannya, di atas pundak Angkatan '45 itu telah diletakkan tugas historis sebagai Generasi Pembebas dalam sejarah bangsa ini.

Setelah Pergerakan Kemerdekaan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, maka Generasi

Pembebas kita telah mengantarkan rakyat:Indonesia ke zaman baru, ialah zaman pembangunan dengan .mengusahakan terciptanya landasan yang kukuh kuat.

Tahap berikut dari zaman pernbangunan itu ialah tinggal landas dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat moderen yang makmur berkeadilan berdasarkan Pancasila. .

Sukses atau gagalnya bangsa :kita setelah tinggal landas nanti dalam mewujudkan masyarakat maju material dan spiritual antara lain akan ditentukan oleh sukses atau gagalnya kita selama Repelita IV untuk menciptakan kerangka landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang kokoh selanjutnya dari bangsa dan negara kita.

Karena itu sangat jelas. bagi kita bahwa Repelita IV mempunyai arti yang teramat penting bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa kita seterusnya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Tahun-tahun di depan kita adalah tahun-tahun yang masih akan sulit, berisi beraneka ragam tantangan dan kerawanan. Meskipun demikian, tahun-tahun di depan kita itu tetap mengandung banyak harapan. Ini mengharuskan kita semua menampilkan tanggung jawab bersama yang sebesar-besarnya agar di satu pihak kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan menundukkan tantangan-tantangan sehingga kita dapat melampaui kerawanan-kerawanan dengan selamat. Di lain pihak, dengan bekerja keras bahu membahu antara semua lapisan, golongan dan kekuatan bangsa ini, kita berusaha mencapai kemajuan yang lebih besar lagi.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 maka tiap tahun dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara kita selalu dihadapkan kepada ujian demi ujian. Namun lima tahun mendatang menghadapkan kita semua pada ujian yang bersifat khusus, dalam arti, bahwa tahun-tahun itu dari kita semua diharapkan ikut

meletakkan kerangka landasan, bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan negara kita dalam dasawarsa-dasawarsa selanjutnya.

Karena itu pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun ini, kita menyadari secara khusus pula betapa perlunya kita mengadakan penyegaran motivasi dan moral dalam menghadapi tugas besar dan tantangan-tantangan berat di tahun-tahun yang akan datang. Tanpa penyegaran motivasi dan moral kita pasti tidak akan mampu mengatasi tantangan-tantangan berat dan memikul tugas-tugas besar tadi.

Sumber bagi penyegaran motivasi dan moral itu ialah penghayatan kepada perjuangan bersama dari semua pihak, semua golongan, semua lapisan dan semua generasi bangsa kita di masa lampau, khususnya dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan Nasional.

Dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan persatuan itu Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan telah menjadi pedoman kita semua tanpa kecuali.

Pancasila merupakan sumber yang hidup, bukan sumber yang kering dan mati, bagi penyegaran motivasi dan moral bagi semua pihak, semua golongan, semua lapisan dan semua generasi dalam menghadapi tantangan dan ujian berat yang akan datang.

Pancasila sebagai sumber penyegaran motivasi dan moral dalam tahun-tahun mendatang tidak lepas dan sama sekali tidak bertentangan dengan sumber penyegaran motivasi dan moral di bidang kehidupan keagamaan, kebudayaan dan intelektual bangsa kita. Penyegaran motivasi dan moral di bidang itu justru memperkuat, memperkaya dan memperdalam penyegaran motivasi dan moral yang bersama-sama kita peroleh dari Pancasila.

Dalam rangka inilah sangat penting bagian yang sangat hakiki dari GBHN 1983 yang mencerminkan tekad kita semua untuk memandang pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Jika kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka ini tidak berarti bahwa kita melamun untuk membangun masyarakat yang sempurna tanpa kekurangan atau tanpa cacad. Sebagai manusia yang secara kodrati memang tidak sempurna, maka kita pun tidak mungkin membangun masyarakat yang sempurna.

Pembangunan, seperti halnya setiap karya manusia tidak akan bebas dari kekurangan dan kesalahan. Itulah sebabnya dalam pembangunan diperlukan koreksi dan pembaharuan terus menerus.

Dengan bertekad melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka kita menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan itu kita mempunyai arah dan tolok ukur bagi pemikiran, perencanaan dan kegiatan kita dalam membangun. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang kita anggap baik dan karena itu harus kita usahakan dengan penuh keyakinan. Kita pun akan mengetahui apa yang harus kita tolak dan karena itu akan kita hindari dengan penuh kesadaran.

Belajar dari pengalaman pembangunan masyarakat-masyarakat moderen lainnya, kita melihat kecenderungan-kecenderungan bahwa pembangunan masyarakat moderen itu dapat mengarah pada pendangkalan kehidupan keagamaan dan spiritual. Tidak jarang juga disertai oleh ketegangan-ketegangan dalam kehidupan keagamaan dan kepercayaan. Kecenderungan-kecenderungan ini dapat kita hindari sedini mungkin dengan pengamalan Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembangunan masyarakat moderen tidak jarang membawa akibat samping merosotnya martabat manusia. Manusia diturunkan harkatnya sehingga hanya merupakan bagian yang tak berarti dari suatu mesin raksasa untuk pembangunan. Kecenderungan ini dapat kita hindari dengan mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya, khususnya Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam melaksanakan pembangunan yang secara konsekuen kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila.

Pembangunan masyarakat moderen acapkali membawa kecenderungan berbenturannya kepentingan antara golongan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita yang majemuk, keanekaragaman kita perlu kita cegah agar tidak menjadi kerawanan-kerawanan. Kecenderungan-kecenderungan ke arah ini dapat kita hindari dengan mengamalkan Sila Persatuan Indonesia dari Pancasila. Pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita harus dapat melunakkan faktor-faktor yang dapat melemahkan persatuan bangsa, sambil memperkuat faktor-faktor yang dapat terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa itu.

Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti kita mengembangkan sistem Demokrasi Pancasila yang mantap dalam rangka kesinambungan, pembaharuan dan peningkatan dari perkembangan pembangunan politik yang telah dapat kita capai hingga sekarang. Dengan demikian, di satu pihak, kita dapat memelihara stabilitas nasional dan pertumbuhan politik, sedang di lain pihak kekuatan-kekuatan dan aspirasi yang terus tumbuh dalam masyarakat dapat tersalur secara positif dan kreatif.

Mengenal pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hal ini harus mewarnai seluruh gerak pembangunan kita. Kita pun harus berusaha untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang cenderung menyertai pembangunan masyarakat moderen yang meningkat.

Sidang Dewan yang terhormat;

Saya menyadari sedalam-dalamnya, bahwa --seperti yang ditegaskan dalam kalimat-kalimat penutup GBHN-- berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu pada kesempatan ini, melalui Sidang Dewan yang mulia ini, saya menyerukan kepada seluruh lapisan rakyat Indonesia dan segenap penyelenggara negara untuk bersama-sama maju sebagai barisan yang besar dengan sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin yang setinggi-tingginya melaksanakan GBHN sebaik-baiknya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya akan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia dan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui, saya telah menyatakan sumpah menurut agama yang saya anut --ialah agama Islam-- untuk melaksanakan GBHN itu sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Karenanya saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas saya itu sebaik-baiknya dengan sepenuh-penuh kemampuan saya.

Dalam pada itu, saya menghargai dan berterima kasih atas sumbangan pikiran yang secara langsung atau tidak langsung telah saya terima dari lembaga-lembaga, golongan-golongan dan perorangan berupa saran-saran yang positif dan kreatif mengenai pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari GBHN itu. Saya mengharapkan lebih banyak lagi datangnya pandangan-pandangan yang positif dan kreatif.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Memasuki tahun ke-39 dari usia Kemerdekaan kita, maka segala perhatian, pemikiran dan usaha-usaha kita akan terpusat pada pelaksanaan Repelita IV dalam rangka melaksanakan GBHN yang telah digariskan oleh Sidang Umum MPR bulan Maret '83 yang lalu. Sebagai Mandataris MPR yang ditugasi untuk melaksanakan segala putusan Majelis, maka saya telah membentuk Kabinet sebagai alat kelengkapan pemerintahan yang sangat penting. Dalam menyusun Kabinet dan menentukan programnya saya memperhatikan dengan saksama Ketetapan-ketetapan MPR tahun

'83 dan juga Ketetapan-ketetapan MPR '78 yang masih berlaku.

Memahami tugas nasional yang utama untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, memperhatikan perkembangan nasional dan internasional yang akan sangat mempengaruhi kita dalam waktu lima tahun mendatang, meneliti tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepada Mandataris, maka dalam membentuk Kabinet Pembangunan IV saya telah menetapkan Panca Krida Kabinet yang sekaligus juga merupakan program nasional untuk waktu lima tahun mendatang.

Panca Krida Kabinet Pembangunan IV itu meliputi :

- Pertama : Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap;
- Kedua : Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Ketiga : Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Keempat : Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional;
- Kelima : Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Seperti halnya Repelita IV, yang merupakan kelanjutan dan peningkatan Repelita III, Panca Krida Kabinet Pembangunan IV ini juga merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Sapta Krida Kabinet Pembangunan III dahulu. Dengan demikian terjamin pula kesinambungan program-program nasional dari kurun waktu lima tahun yang lalu dengan program nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Memelihara kesinambungan, dengan berani mengadakan koreksi sambil meningkatkan dan memperluas

pembangunan nasional itu sangat penting, sebab pembangunan nasional dalam jangka panjang memang merupakan proses maju dari serangkaian tahap-tahap pembangunan.

Panca Krida itu diarahkan untuk menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang terus dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, maka kerangka landasan yang tercipta dalam Repelita IV tadi kita mantapkan lagi dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI bangsa kita dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, ialah masyarakat yang adil dan yang makmur berdasarkan Pancasila.

Sekarang, izinkan saya, Saudara Ketua yang terhormat, menjelaskan pokok-pokok masing-masing Krida dari Panca Krida. Penguraian Panca Krida ini sekaligus merupakan bahan-bahan dan penegasan-penegasan sikap Pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah di berbagai bidang yang sedang atau akan dihadapi dalam masa-masa mendatang.

Krida yang pertama, ialah meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang mantap.

Dengan sadar dalam Krida pertama ini ditekankan perlunya dukungan ketahanan nasional dalam melaksanakan Trilogi Pembangunan.

Mengenai ketahanan nasional maka pengertiannya jelas jauh lebih luas dan dalam dari pertahanan dan keamanan nasional saja. Ketahanan nasional mencakup semua segi kehidupan bangsa dan negara baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, di samping pertahanan dan keamanan itu sendiri. Karena itu ketahanan nasional berarti berkembangnya semua segi kehidupan bangsa dan negara tadi secara sehat dan serasi, sehingga keseluruhannya menghasilkan daya tahan yang besar dalam menghadapi ancaman, gangguan dan kerawanan-kerawanan baik yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar. Ini berarti bahwa segala gerak dan



arah pembangunan kita tidak boleh melemahkan, melainkan harus memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan nasional ini perlu mendapat perhatian kita yang sebesar-besarnya karena tahun-tahun yang akan datang kita akan memasuki tahun-tahun yang sulit, berisi beranekaragam tantangan dan bisa juga merupakan tahun-tahun yang rawan.

Sebagai bangsa yang bertekad meneruskan pembangunan, maka di satu pihak kita harus berjuang keras agar momentum pembangunan tetap berada di tangan, sedang pada pihak lain kita menjaga agar masalah-masalah sosial ekonomi jangan sampai menimbulkan gejolak sosial politik dan menggoyahkan stabilitas nasional.

Demikian pula, dampak dan perkembangan politik internasional dan keamanan dunia pada umumnya dapat lebih terasa di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sampai detik ini pun belum ada tanda-tanda yang meyakinkan mengenai peredaan ketegangan antara Timur dan Barat. Malahan perlombaan persenjataan terus berlangsung. Perlombaan senjata ini jelas menguras kemampuan dunia untuk memperbaiki perekonomiannya yang suram. Kesuraman ekonomi dunia ini bertambah, karena di negara-negara industri yang sudah maju belum ada tanda-tanda lahirnya kesadaran baru yang diperlukan untuk membuka pintu bagi kemajuan masalah Utara - Selatan. Kemelut dunia bertambah lagi dengan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar dunia, serta pergolakan-pergolakan yang bermunculan di berbagai kawasan.

Selanjutnya, makin dekatnya perampungan proses peralihan generasi yang meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat kita, dalam tubuh pemerintahan, Angkatan Bersenjata, kekuatan sosial politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kalangan cerdik cendekiawan, dunia ekonomi dan seterusnya. Peralihan generasi kali ini mempunyai arti yang khusus dalam pertumbuhan bangsa kita, sebab Generasi '45 yang melahirkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia Merdeka diganti oleh generasi

baru dengan pengalaman sejarah dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Di samping mengandung harapan, maka masa-masa peralihan itu juga mengandung kerawanan. Peralihan generasi ini akan dapat selamat kita lewati dengan saling pengertian dan saling menghormati dan dengan rasa persatuan dan kesatuan yang sekukuh-kukuhnya.

Sementara itu, permasalahan dalam masyarakat dan negara pun akan bertambah rumit dan jalin menjalin, jumlah penduduk dan masalah kesempatan kerja terutama di kalangan muda akan bertambah. Aspirasi-aspirasi dan harapan-harapan di kalangan masyarakat juga akan bertambah meningkat.

Semuanya itu menyadarkan kita betapa pentingnya memperkuat ketahanan nasional, sebagai bagian dari persiapan-persiapan yang harus kita adakan bersama dalam mengadakan prasyarat-prasyarat untuk tinggal landas pada dasawarsa 90-an, yang sudah harus kita mulai dalam waktu lima tahun mendatang dalam menyiapkan kerangka landasannya.

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi terhadap dampak resesi ekonomi dunia, maka kita telah melakukan berbagai langkah di bidang ekonomi, ialah dengan mengadakan devaluasi rupiah beberapa bulan yang lalu, dengan penjadwalan kembali sejumlah proyek-proyek pembangunan yang besar, dengan meningkatkan pengerahan modal dalam negeri melalui kebijaksanaan perbankan. Pendek kata kita telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengeratkan ikat pinggang. Saya berterima kasih, bahwa kebijaksanaan itu dipahami oleh masyarakat luas dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Langkah-langkah yang tampaknya pahit itu tidak lain adalah untuk memperkuat lagi ketahanan nasional kita, khususnya di bidang ekonomi, agar mampu menanggulangi tantangan-tantangan dan kerawanan di bidang ekonomi dalam melanjutkan pembangunan dalam menyiapkan kondisi yang memadai untuk memasuki Repelita IV.

Tanpa tindakan devaluasi, maka cadangan devisa kita akan segera habis, dan tanpa penjadwalan kembali proyek-proyek, beban pembayaran hutang akan memberatkan, sehingga kita tidak mungkin lagi untuk melanjutkan pembangunan.

Perlu saya jelaskan bahwa penjadwalan kembali proyek-proyek tadi tidak berarti tidak tercapainya sasaran-sasaran dalam Repelita III, sebab proyek-proyek itu memang kita bangun karena di waktu yang lalu kita memiliki tambahan kemampuan pembiayaan yang besar yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak bumi.

Devaluasi dan penjadwalan kembali proyek-proyek besar, yang sebelum itu kita awali dengan peningkatan harga bahan bakar minyak, menunjukkan sikap kita yang realistis dan merupakan tindakan penanggulangan yang efektif terhadap tantangan yang bersumber pada gejolak ekonomi dunia. Khususnya devaluasi dan penjadwalan kembali proyek-proyek merupakan langkah yang sangat menentukan untuk memperkuat ketahanan neraca pembayaran Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian yang melanda pasaran modal di dunia dewasa ini.

Dalam pada itu tekad kita untuk melanjutkan pembangunan tidak pernah mengendor. Untuk itu kita harus dapat meningkatkan lagi pengerahan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri.

Pengerahan dana pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri akan terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat.

Untuk meningkatkan Tabungan Pemerintah, maka di satu pihak, perlu ditingkatkan penerimaan negara semaksimal mungkin, dan di lain pihak, pengeluaran rutin dibatasi sampai pada tingkat yang tidak dapat dikurangi lagi. Langkah itu akan dilakukan terus menerus di tahun-tahun yang akan datang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seperti anggaran berimbang yang dinamis, penghematan pengeluaran rutin dan sebagainya. Dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan negara, akan diadakan penyempurnaan sistem perpajakan, yang meskipun

telah mengalami berbagai perubahan, hakekatnya merupakan warisan zaman penjajahan Belanda.

Untuk itu sebelum Repelita IV kita mulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting, yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dalam pada itu kita semua sadar bahwa untuk membiayai pelaksanaan Repelita IV kita tidak dapat dan tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita IV. Dengan pembaharuan perpajakan nasional itu sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini akan disederhanakan; yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, penyederhanaan tarif pajak dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Dengan pembaharuan ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar, sedang jumlah wajib pajak akan makin luas. Selanjutnya pembaharuan perpajakan meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental. Dengan pembaharuan perpajakan ini maka beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Singkatnya kita akan menciptakan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap orang; sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajiban; dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak. Saya percaya, bahwa Dewan yang terhormat akan memberi

perhatian yang khusus terhadap penyelesaian undang-undang perpajakan ini nanti.

Adapun Tabungan Masyarakat merupakan sumber dana untuk kegiatan investasi di luar sektor negara. Sebagian dari tabungan masyarakat ini berasal dari sektor dunia usaha. Bahagian terbesar lainnya berasal dari sektor rumah tangga, yang saat ini masih terdapat dalam bentuk tradisional. Potensi yang besar ini perlu dikembangkan agar kita makin dapat mengerahkan dana pembangunan dengan kekuatan sendiri. Peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang pembiayaannya bersumber pada kemampuan masyarakat sendiri seperti itu tidak akan mengakibatkan gejolak inflasi. Itulah latar belakang pemikiran dan tujuan dari kebijaksanaan Pemerintah yang telah diambil baru-baru ini dengan menaikkan suku bunga Tabanas dan deposito berjangka serta dengan pembaharuan kebijaksanaan perkreditan. Sangat jelas, kebijaksanaan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita dan sekaligus untuk mengerahkan kekuatan sendiri guna melanjutkan pembangunan yang meningkat. Bilamana kita berhasil mengerahkan tabungan masyarakat secara besar-besaran dalam bentuk Tabanas dan deposito pada perbankan maka akan tersedianya dana perkreditan yang sangat besar, yang antara lain diarahkan untuk meningkatkan penyediaan perkreditan di daerah pedesaan guna lebih memperlancar kegiatan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan gerakan tabungan nasional dengan menabung pada Tabanas dan deposito di perbankan dan dengan demikian ikut serta menyediakan dana bagi pembangunan nasional, di samping memperoleh imbalan yang cukup menarik bagi tabungannya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Repelita IV maka di samping dana pembiayaan rupiah juga diperlukan devisa dalam jumlah yang meningkat. Guna menambah penerimaan devisa maka diambil serangkaian langkah-langkah untuk lebih mendorong ekspor

barang, terutama di luar minyak dan gas alam, serta ekspor jasa pada umumnya. Dalam hubungan ini diutamakan perluasan pasaran barang-barang ekspor Indonesia serta peningkatan daya saing barang-barang tersebut di pasaran luar negeri. Kegiatan lain yang mengandung potensi besar bagi penerimaan devisa adalah bidang pariwisata. Oleh karena itu peningkatan pariwisata merupakan salah satu bidang yang diutamakan. Dalam pada itu guna mempercepat pelaksanaan pembangunan maka di samping peningkatan ekspor barang dan jasa serta pariwisata, kita akan memanfaatkan pula pinjaman luar negeri. Sebagaimana halnya hingga kini maka kita hanya bersedia menerima pinjaman luar negeri sepanjang tidak ada ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Sudah barang tentu pinjaman tersebut hanya digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan kita. Dalam hubungan ini kita akan tetap sangat waspada, lebih-lebih mengingat pengalaman berbagai negara yang sedang membangun akhir-akhir ini yang terjerat di dalam beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang melampaui batas kemampuan. Kewaspadaan itu juga tetap kita pegang teguh mengingat gejolak keuangan dan moneter yang masih terus melanda ekonomi dunia.

Dengan ketahanan nasional di berbagai bidang itu kita dapat meningkatkan pelaksanaan Trilogi Pembangunan dengan makin memeratakan pembangunan menuju keadilan sosial, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dengan memperkukuh lagi stabilitas nasional.

Sidang Dewan yang terhormat;

Seperti yang ditunjukkan oleh GBHN maka Repelita IV itu merupakan tahapan keempat dari serangkaian pelaksanaan Repelita dalam usaha kita untuk melaksanakan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Dengan melihat hasil-hasil pembangunan di segala bidang sampai sekarang, dan dengan belajar

secara pandai dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, maka GBHN juga memberi petunjuk agar kita mempercepat tercapainya sasaran jangka panjang tadi. Ini berarti bahwa di bidang ekonomi kita perlu mempercepat terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, di mana terdapat industri yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

Pembangunan akan kita titik beratkan pada sektor pertanian, dengan juga meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.

Dalam Repelita IV nanti, kita harus berusaha keras, agar pertumbuhan di sektor industri dan sektor-sektor lain di luar pertanian maju lebih cepat dari sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian sendiri juga harus kita tingkatkan.

Adapun tujuan Repelita IV adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang makin adil dan merata di satu pihak, dan bersamaan dengan itu di lain pihak meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Repelita III, maka dalam Repelita IV akan makin kita tingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lahir batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja. Demikian pula kita akan meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang telah digarap selama Repelita III tetapi belum sepenuhnya terpecahkan.

Secara keseluruhan, maka keadilan sosial akan mendapat tempat yang utama dalam Repelita IV dengan melanjutkan, memperluas dan memberi kedalaman-kedalaman pada pelaksanaan Delapan Jalur Pemerataan yang selama ini telah kita tempuh.

Di bidang pertanian kita akan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Keseluruhan pembangunan pertanian ini sekaligus diarahkan pada usaha peningkatan penghasilan petani, perluasan kesempatan kerja,

pemerataan kesempatan berusaha, perbaikan gizi masyarakat, dukungan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kegiatan transmigrasi. Melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi akan kita tingkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Secara khusus masalah tanah akan mendapatkan perhatian dengan melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah mengendalikan secara efektif masalah-masalah penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah dan pengalihan hak atas tanah, sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata. Dalam pengalihan hak atas tanah akan dicegah pemilikan tanah yang melampaui batas; sedang di lain pihak akan diusahakan untuk mencegah pembagian tanah yang sangat kecil agar manfaat tanah tidak makin berkurang.

Pembangunan pertanian ini akan merupakan medan juang yang tidak pernah akan kita abaikan, sebab pertanian harus dapat mendukung pembangunan industri. Di samping itu, produksi pertanian juga tergantung dari musim. Dengan musim kemarau yang panjang, yang kita alami dalam tahun yang lalu dan tahun ini, maka produksi beras kita tidak dapat mencapai kenaikan tinggi seperti yang kita capai dalam tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun '80 produksi beras meningkat dengan 12,8%, dalam tahun '81 dengan 10,5%, dalam tahun '82 dengan 4,1 % dan dalam tahun '83 diperkirakan bahwa angka persentase kenaikan akan lebih rendah lagi. Meskipun jumlah produksi beras tetap meningkat dari tahun ke tahun dan sudah jauh melebihi sasaran Repelita III, namun perkembangan ini hendaknya menyadarkan kita bahwa pembangunan pertanian harus benar-benar tetap kita garap dengan penuh ketekunan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian maka akan ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk membuka dan mengusahakan tanah-tanah kritis dan tanah-tanah kering, sehingga dapat menjadi produktif.



Untuk mendukung pembangunan pertanian akan dilanjutkan pembangunan pengairan yang sekaligus dipadukan dengan tujuan untuk melestarikan sumber-sumber air, penyediaan air untuk kesejahteraan umum serta dukungan terhadap pembangunan industri dan kelistrikan. Dengan langkah-langkah itu akan makin kuat lah pertanian kita dalam mendukung perkembangan industri dalam rangka mencapai keseimbangan struktur ekonomi.

Dalam rangka itu maka pembangunan industri akan makin ditingkatkan. Pembangunan industri tetap diarahkan untuk terus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan dari impor, serta untuk mendorong ekspor hasil industri guna memperbesar penerimaan devisa yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan.

Dalam pembangunan industri ini perhatian yang khusus diarahkan pada pembangunan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, dengan maksud agar secara bertahap kita akan dapat memenuhi sendiri kebutuhan mesin-mesin -- termasuk suku cadangnya -- dalam rangka pembangunan industri selanjutnya. Untuk mendukung maksud itu maka juga ditingkatkan pembangunan industri yang menjamin pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Dalam hubungan ini selama Repelita III telah dimulai pelaksanaan investasi di berbagai macam industri yang akan selesai dan mulai berproduksi dalam tahun-tahun permulaan Repelita IV. Sementara itu juga ditingkatkan pembangunan industri sektor pertanian yang menghasilkan sarana produksi pertanian, menghasilkan alat pertanian dan mengolah hasil pertanian. Dalam rangka pemerataan pembangunan yang harus makin menonjol dalam Repelita IV, dan sekaligus untuk memperluas kesempatan kerja, maka juga ditingkatkan kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat. Agar industri dapat makin berkembang dalam tahun-tahun yang akan datang, maka akan diciptakan kaitan yang erat dan saling menghidupi antara industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Sementara itu kita akan mengembangkan pula berbagai industri tertentu lainnya yang selama ini telah dirintis seperti industri maritim, industri penerbangan, industri alat-alat berat, industri elektronika dan industri yang dapat menunjang pertahanan keamanan.

Untuk semuanya itu dilanjutkan pengembangan dan perluasan dalam penguasaan teknologi dan keteknikan lainnya yang juga telah lama kita rintis sampai sekarang. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pembangunan industri adalah kesadaran kita yang harus meningkat dalam menggunakan produksi dalam negeri.

Dalam pada itu pembangunan pertambangan juga kita tingkatkan. Di samping minyak dan gas bumi, maka pembangunan pertambangan lainnya mendapat perhatian yang lebih besar. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi pertambangan, meningkatkan ekspor guna menambah penerimaan devisa dan juga diarahkan untuk ikut memperbesar penerimaan keuangan negara. Di samping itu juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan bahan-bahan tambang akan kita lanjutkan usaha-usaha untuk mengolah bahan-bahan tambang tersebut di dalam negeri. Pembangunan dan perluasan kilang minyak di Cilacap yang saya resmikan awal bulan ini --yang segera akan disusul dengan selesainya perluasan kilang minyak di Dumai dan Balikpapan-- merupakan usaha untuk makin memperbanyak pengolahan bahan tambang di dalam negeri. Usaha untuk mengolah sebanyak-banyaknya kekayaan alam di dalam negeri ini merupakan kebijaksanaan yang akan terus kita lanjutkan dan kita perluas. Karena itu lah sejak beberapa waktu yang lalu kita batasi dan pada saatnya kita tidak lagi mengekspor kayu glondongan; melainkan kita olah kayu kekayaan hutan kita untuk menjadi kayu lapis.

Dalam pada itu pengelolaan sektor pertambangan diserasikan dengan kebijaksanaan umum energi. Perkembangan sampai sekarang menunjukkan bahwa penggunaan minyak bumi sebagai sumber utama pemakaian energi dalam negeri terus meningkat, sedangkan bagaimanapun juga persediaan minyak bumi itu sifatnya terbatas. Karena itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi ; sedangkan di lain pihak akan dikembangkan sumber-sumber energi lainnya seperti batubara, tenaga air, panas bumi, biogas dan lain-lainnya. Dalam rangka pengembangan energi ini, maka pembangunan tenaga listrik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya industri. Untuk tahun-tahun yang akan datang usaha listrik masuk desa akan lebih diperluas lagi.

Sementara itu untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan makin meningkat, maka akan ditingkatkan pula pembangunan perhubungan baik di darat, di laut, di udara maupun di sungai dan danau-danau. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk melancarkan hubungan antara daerah produksi dengan daerah pemasaran, mendorong terbukanya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dan melancarkan hubungan ke daerah-daerah pemukiman yang terpencil. Khusus mengenai pelayaran luar negeri akan lebih ditingkatkan peranan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam pengangkutan barang-barang perdagangan luar negeri. Dalam pada itu pembangunan telekomunikasi, pos dan giro juga mendapat perhatian dalam peningkatannya.

Karena tujuan terpenting dari pembangunan kita adalah kesejahteraan rakyat, maka pembangunan perumahan dan pemukiman juga akan kita tingkatkan dan kita perluas. Perhatian terutama diarahkan pada pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena pembangunan perumahan memerlukan biaya yang sangat besar, maka dalam rangka memobilisasi kemampuan masya-

rakat, akan didorong pula kemampuan dan kegiatan usaha koperasi, swasta dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pada itu seluruh pembangunan sektoral akan selalu diusahakan berkembang selaras dan saling menunjang dengan pembangunan daerah. Dengan kemajuan daerah-daerah yang lebih seimbang, maka akan makin terbina lah Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan keamanan. Perhatian yang makin besar akan diberikan pada pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang, daerah-daerah kepulauan yang terpencil dan daerah-daerah perbatasan. Di samping itu perhatian juga terus diberikan kepada pembangunan daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang sangat padat penduduknya. Untuk meningkatkan pembangunan daerah ditingkatkan pula langkah-langkah dan suasana yang dapat terus mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, terutama masyarakat di pedesaan. Dalam hubungan ini peranan PKK yang selama ini telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sekaligus meningkatkan peranan partisipasi wanita akan terus digalakkan.

Dalam rangka mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat itu, maka antara lain perlu kita kembangkan terus koperasi. Lebih dari itu, pengembangan koperasi merupakan usaha yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan semangat dan kehendak pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dalam Repelita IV koperasi harus makin luas dan berakar dalam masyarakat, sehingga koperasi secara bertahap dapat menjadi salah satu sokoguru perekonomian nasional kita. Untuk itu peranan dan usaha koperasi perlu ditingkatkan dan diperluas diberbagai sektor : seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan koperasi di berbagai bidang tadi, maka akan didorong dan dikembangkan kejasama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara. Di samping itu juga akan kita lanjutkan pembinaan koperasi fungsional seperti koperasi

buruh dan karyawan perusahaan, koperasi pegawai negeri, koperasi mahasiswa dan sebagainya sehingga koperasi makin memasyarakat dan makin membudaya.

Demikian pula, dalam rangka memperbesar partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka peranan dunia usaha nasional juga akan ditingkatkan. Dalam hal ini perhatian khusus diberikan untuk membina terus golongan ekonomi lemah. Untuk itu diambil langkah-langkah guna lebih memperluas kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan berusaha yang tersedia. Selanjutnya akan makin ditingkatkan iklim yang menggairahkan dunia usaha. Semua perizinan yang menghambat kegiatan ekonomi harus dihapuskan. Prosedur perizinan yang masih ada harus makin disederhanakan dan tidak boleh membebani dunia usaha. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha nasional akan makin besar peranannya dalam Repelita IV nanti.

Di samping kita akan mendorong terus partisipasi usaha swasta nasional, kita juga tetap membuka kesempatan bagi usaha swasta asing yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dalam bidang-bidang yang masih terbuka dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan jaminan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perkiraan kemampuan kita untuk mengembangkan pertumbuhan di berbagai sektor maka laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita IV diperkirakan sebesar rata-rata 5% setahun. Angka ini tidak sebesar laju pertumbuhan ekonomi rata-rata selama Repelita III, yang menunjukkan perkembangan sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi tahun '79 sebesar 7,3%, tahun '80 sebesar 9,9%, tahun '81 sebesar 7,9% dan tahun '82 sebesar 2,25%. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam tahun '82 menunjukkan betapa berat akibat dari tiga hal yang berlangsung bersamaan dalam tahun tersebut. Ke tiga hal itu adalah : (1) kemerosotan yang sangat tajam dalam kegiatan ekonomi dunia

sebagai pencerminan resesi ekonomi dunia yang terpanjang selama 50 tahun yang terakhir; (2).sangat menyempitnya pasaran minyak bumi di dunia; dan (3) musim kemarau parjang yang melanda Indonesia dan sangat mempengaruhi produksi pertanian. Dewasa ini pemulihan kegiatan ekonomi dunia berlangsung dengan lamban sekali dan diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun-tahun yang akan datang masih akan rendah. Lagi pula sebagai akibat belum adanya penanganan yang tuntas dan efektif terhadap masalah-masalah struktural serta mendasar daripada tatanan ekonomi dunia maka tidak ada kepastian bahwa resesi yang dialami dunia dewasa ini tidak akan terulang kembali sesudah beberapa tahun berlalu. Karena itu perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Repelita IV sebesar rata-rata 5% setahun adalah perkiraan yang cukup realistik. Namun untuk mewujudkan hal tersebut dalam ruang lingkup ekonomi dunia yang serba suram serta terus menerus dilanda ketidak pastian dalam berbagai bentuk dan macamnya, maka diperlukan tekad serta usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Dalam pada itu selama Repelita IV diusahakan agar struktur ekonomi Indonesia makin seimbang. Untuk itu pertumbuhan sektor industri dan sektor-sektor lainnya perlu berlangsung lebih cepat daripada sektor pertanian, sedang untuk sektor pertanian sendiri tetap diusahakan pertumbuhan yang memadai. Diperkirakan bahwa sektor industri akan tumbuh dengan rata-rata sekitar 9,5% setahun, sedang sektor pertanian dengan sekitar 3%. Dengan laju pertumbuhan tersebut maka peranan sektor industri akan lebih menonjol dan struktur ekonomi Indonesia akan makin seimbang.

Kita menyadari bahwa seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan yang antara lain meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup,

penyebaran penduduk, pendidikan, masalah lapangan kerja dan sebagainya.

Kelahiran akan terus kita kendalikan melalui peningkatan dan perluasan pelaksanaan program nasional keluarga berencana. Sedangkan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak, diharapkan dapat menurun dengan cepat berkat bertambah baiknya taraf kesejahteraan sebagai hasil dari kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan serta penyuluhan yang juga akan makin meluas. Dalam rangka ini maka dalam Repelita IV nanti diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan. Dewasa ini laju pertumbuhan penduduk masih berada sedikit di atas 2% setahun, sedang pada akhir Repelita IV diusahakan agar sudah ada di bawah 2%. Dengan demikian selama Repelita IV laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata 2% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar itu maka produksi nasional nyata per jiwa akan meningkat dengan rata-rata 3% per tahun selama Repelita IV yang akan datang.

Penyebaran penduduk yang akan merupakan masalah yang makin mendesak, akan kita tangani melalui peningkatan transmigrasi. Dalam Repelita IV akan diusahakan dapat ditransmigrasikan jumlah penduduk yang lebih besar daripada dalam Repelita III. Sebagaimana kita ketahui sasaran transmigrasi dalam Repelita III adalah sebesar 500.000 kepala keluarga; yang diharapkan jumlah tersebut dapat dilaksanakan. Di samping untuk menyebarkan penduduk dan tenaga kerja, maka transmigrasi juga ditujukan untuk membuka dan mengembangkan daerah produksi baru di luar Jawa dan Bali, terutama untuk membuka daerah pertanian yang baru.

Mengenai perluasan lapangan kerja yang merupakan salah satu masalah besar yang harus kita tangani dalam tahun-tahun mendatang, maka pemecahannya diletakkan dalam keseluruhan gerak dan arah pembangunan. Artinya semua program pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan daerah, selalu diusahakan agar menciptakan lapangan kerja se

banyak-banyaknya. Dalam hal ini perhatian yang khusus akan diberikan kepada tenaga kerja usia muda, yang dewasa ini dan di tahun-tahun yang akan datang akan bertambah besar jumlahnya. Pengalaman kita selama ini menunjukkan, bahwa acapkali terjadi bukan lapangan kerja yang tidak ada, melainkan karena ketidak tahuan di mana lapangan kerja itu terbuka dan ketrampilan apa yang diperlukan. Tidak disangsikan lagi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang suka bekerja keras, memiliki bakat-bakat yang mudah dibina dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Karena itu di tahun-tahun mendatang akan dikembangkan dan disempurnakan informasi ketenagakerjaan serta akan diperluas pendidikan ketrampilan, sehingga terbina tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam hubungan ini saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati setiap jenis pekerjaan yang halal. Martabat manusia bukan ditentukan oleh tinggi atau rendahnya penghasilan, bukan ditentukan oleh "halus" atau "kasar"-nya pekerjaan, bukan oleh jenis pekerjaan "otak" atau jenis pekerjaan "tangan". Martabat manusia ditentukan oleh kemampuan manusia bekerja produktif, halal dan tidak amoral.

Memang, pembangunan suatu bangsa akan berhasil jika bangsa itu berhasil membangun sumber daya manusianya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dengan sumber daya manusia yang berkembang, maka sesuatu bangsa dapat mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi walaupun bangsa itu miskin dengan kekayaan alam.

Pengembangan sumber daya manusia terletak pada usaha-usaha pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Karena itu di tahun-tahun mendatang masalah pendidikan ini akan mendapat perhatian yang makin besar. GBHN menegaskan bahwa pendidikan nasional kita hams berdasarkan Pancasila. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta



tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsanya. Dengan arah itu maka dalam lima tahun mendatang titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu serta perluasan pendidikan dasar guna memantapkan pelaksanaan wajib belajar dan bersamaan dengan itu memperluas kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah. Demikian pula, sesuai dengan kemampuan akan diperluas kesempatan belajar pada pendidikan tinggi. Sistem pendidikan secara terus menerus akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang meningkat di segala bidang yang memerlukan berbagai jenis keahlian dan ketrampilan, serta sekaligus dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Dalam hubungan ini berbagai macam pendidikan kejuruan dan politeknik akan lebih diperluas dan ditingkatkan mutunya.

Cita-cita kita dalam pembangunan adalah membangun masyarakat Indonesia moderen, yang dalam kemoderenannya tetap masyarakat Indonesia yang berkepribadian sendiri. Untuk itu lah dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan kita akan terus membina dan mengembangkan bersama-sama nilai budaya Indonesia guna mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan. Bersamaan dengan itu tanggung jawab social dan disiplin nasional akan terus kita bina dan kita kembangkan bersama-sama pula sebagai usaha untuk memperkuat kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria.

Dengan rasa tanggung jawab yang besar, kita akan makin meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa di berbagai bidang kehidupan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional. Dalam hubungan ini perlu makin dikembangkan sikap yang saling percaya-mempercayai, sikap

saling hormat-menghormati serta sikap saling memerlukan dalam hubungan antara golongan masyarakat kita.

Demikian besar tugas-tugas pembangunan di hadapan kita, demikian banyak tantangan-tantangan yang harus kita tundukkan, maka pembangunan itu akan berjalan selamat dan memberi kebahagiaan lahir batin kepada kita semua, jika kita dapat membekali diri dengan sikap rohani yang bersih dan akhlak yang luhur. Untuk itu, lebih-lebih karena kita adalah bangsa yang kuat rasa keagamaan kita, maka pembangunan kehidupan beragama juga akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Sebagai umat beragama dalam Negara Pancasila yang sedang membangun, maka tugas umat beragama di negeri ini adalah mengamalkan sebaik-baiknya ajaran agama masing-masing dalam mengemban tugas bersama untuk membangun bangsa dan negara ini. Untuk itu pula, maka seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, kita akan melanjutkan pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan di antara semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Sekarang, izinkan saya menguraikan kerangka pelaksanaan Krida kedua, ialah meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Krida ini merupakan prasyarat yang penting, lebih-lebih karena tahun-tahun mendatang kita akan meningkatkan dan memperluas pembangunan dalam rangka menciptakan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan yang memasuki tahap tinggal landas. Aparatur negara kita --baik sipil maupun ABRI-- memainkan peranan yang besar dan sentral dalam kehidupan bangsa

dan negara kita sampai sekarang, khususnya dalam menggerakkan pembangunan. Yang penting kita jaga adalah agar aparaturnya yang kuat itu tetap dapat memberi ruang gerak dan kegairahan bagi prakarsa-prakarsa masyarakat sendiri dalam ikut mengambil peranan dalam kiprahnya pembangunan. Karena itu peningkatan pendayagunaan aparaturnya tidak hanya menyangkut segi-segi efisiensi dan administratif belaka, melainkan yang juga tidak kalah penting ialah pengembangan dedikasi dan motivasinya untuk mengantarkan bangsa dan negara ke tingkat yang lebih maju dalam sejarahnya. Dengan demikian maka pemerintahan yang bersih dan berwibawa memperoleh arti yang lebih dalam, bukan saja sebagai aparaturnya yang tidak korup, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sifat-sifat tercela lainnya; melainkan aparaturnya yang mampu menjadi kekuatan pendorong pembaharuan dalam masyarakat, mengantarkan bangsa Indonesia tinggal landas membangun dengan kekuatan sendiri.

Pemantapan pemerintahan yang bersih dilakukan dengan kerangka sistem dan langkah yang terpadu, baik pencegahan maupun penindakan. Di samping perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan personalia yang terus menerus di semua jajaran dan tingkatan aparaturnya pemerintahan, maka sistem dan langkah-langkah pengawasan dikembangkan lebih konseptual. Demikian penting pengawasan ini, sehingga tidak kurang dari Saudara Wakil Presiden yang menangani masalah ini. Di samping itu, ada Menteri Negara yang secara khusus melakukan pengawasan pembangunan, ialah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Baru-baru ini juga telah dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Mengenai langkah-langkah penindakan oleh pihak Kejaksaan terhadap yang bersalah melakukan penyelewengan, korupsi dan sebagainya akan terus dilaksanakan. Pemerintah tidak akan bertindak setengah-setengah dalam hal ini. Langkah ini mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan berkembang pula sanksi sosial dan sanksi moral terhadap koruptor.

Dengan demikian akan timbul sikap malu dan takut untuk melakukan korupsi.

Meskipun tindakan pemberantasan korupsi ini akan terus dilaksanakan, namun ini tidak berarti bahwa aparaturnya telah demikian parah. Sebagian terbesar pejabat dan pegawai negeri telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah pengabdian-pengabdian yang bekerja dengan tertib dan tekun dengan penuh kejujuran. Dalam hubungan ini saya perlu memberi penegasan bahwa tindakan anti korupsi ini tidak perlu membawa ketakutan kepada siapapun, sebab hanya yang salah lah yang pantas dihindangi rasa takut.

Dalam pada itu, juga dalam rangka usaha mendayagunakan aparaturnya, Pemerintah berharap secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU Peradilan Tata Usaha Negara, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat;

Krida ketiga ialah pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemasyarakatan ideologi Pancasila ini merupakan prasyarat bagi memantapkan pelaksanaan pembangunan selanjutnya sebagai pengamalan Pancasila dan untuk menjamin kelestarian kehidupan bangsa dan negara kita. Ini mengandung arti bahwa usaha menciptakan kerangka landasan yang kita usahakan dalam Repelita IV harus berisi langkah-langkah untuk memantapkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya kita makin nyata didasari, dijiwai dan diarahkan oleh Pancasila.

Justru untuk menyongsong tugas besar di masa datang itu kita perlu menarik pelajaran dari masa lampau. Adalah tidak bertanggung jawab apabila kita yang hidup di masa sekarang tidak mengambil langkah-langkah yang perlu, sehingga generasi-generasi yang akan datang merasakan kepahitan-kepahitan yang pernah

kita alami di masa lampau. Adalah tugas kita meninggalkan kepahitan masa lampau itu menjadi sejarah, dan tidak membiarkannya menjadi benih-benih yang kelak akan membelit kembali generasi-generasi yang akan datang.

Untuk itulah maka kerangka landasan yang harus kita ciptakan adalah kerangka landasan pembangunan bangsa kita yang mampu menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional, dan pembangunan sebagai pangamalan Pancasila.

Bagi kita Pancasila adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Ia terbukti kuat menjadi dasar negara karena Pancasila adalah jiwa bangsa kita, kepribadian bangsa kita, pandangan hidup bangsa kita dan ideologi nasional sekaligus. Tanpa semuanya itu maka Pancasila sudah akan lama runtuh karena ujian dan cobaan yang berat di masa lampau.

Jika dahulu perjuangan kita berkisar pada usaha mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila, maka sejak MPR menetapkan P4 di tahun 1978, perjuangan itu kita tingkatkan dengan gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan pemasyarakatan P4 yang terus meluas selama lima tahun terakhir, maka sekarang, kita maju selangkah lagi dengan mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional kita seperti yang kita tegaskan sendiri dalam GBHN sebagai hasil Sidang Umum MPR bulan Maret yang lalu.

Sejak semula kita memandang pembangunan nasional kita dalam arti yang seluas-luasnya. Kita memandang pembangunan itu sebagai pembangunan lahir batin, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini mengandung arti bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara kita baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan keamanan dan

seterusnya. Ini adalah langkah nyata agar suasana serba Pancasila terasa di mana-mana, membimbing dan memberi arah kehidupan kita semua dalam bermasyarakat. Tegasnya, Pancasila sebagai pedoman sikap hidup sehari-hari manusia Indonesia dalam bermasyarakat. Tanpa itu maka Pancasila tetap akan tinggal sebagai semboyan kosong. Apabila ini terjadi bukan saja kita mengulangi kesalahan masa lampau yang telah merobek-robek tubuh bangsa kita; melainkan juga berarti meninggalkan kerawanan-kerawanan bagi sejarah bangsa kita di masa depan dan marabahaya bagi generasi-generasi yang akan datang.

Dalam menjamin kelestarian Pancasila itu lah, GBHN telah menggariskan bahwa semua kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Ini adalah keputusan bersama dan konsensus nasional yang sangat penting, tepat dan bertanggung jawab.

Sebagai ideologi, Pancasila bukan gabungan dari bermacam-macam ideologi lain yang ada di dunia ini. Pendahulu-pendahulu kita yang meletakkan dasar negara ini menggali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri, dari kepribadian kita sendiri. Pancasila adalah ideologi nasional yang menjadi milik kita bersama. Jika masing-masing golongan memiliki ideologi sendiri, maka kita akan kembali ke zaman "nasakom" yang pernah kita alami, dengan segala malapetakanya. Menghidupkan kembali suasana seperti "nasakom" --walaupun komunisnya telah hilang-- berarti memasang kembali bom waktu yang cepat atau lambat pasti akan meledak.

Ada yang khawatir bahwa pelaksanaan dari ketetapan ini akan menjerumuskan kita kepada sistem partai tunggal. Kekhawatiran ini tidak beralasan. Saya yakin Sidang Umum MPR bulan Maret yang lalu tidak mempunyai maksud ke arah itu. Ketetapan hati kita untuk menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik tidak lain adalah perampungan dan pembulatan proses pembaharuan kehidupan politik, yang sejak lahirnya Orde Baru telah kita putuskan justru untuk menja-

min kelanjutan dan kelancaran pembangunan bangsa kita. Walaupun ketiga kekuatan sosial politik yang kita miliki menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik, namun mereka akan tetap memiliki pendekatan dan penekanan sendiri dalam memikirkan dan memecahkan masalah-masalah luas yang kita hadapi dalam pembangunan bangsa ini. Mereka akan menawarkan program mereka masing-masing dalam masa Pemilihan Umum, sekalipun program itu merupakan program dari pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Mereka akan mengibarkan tanda gambar sendiri, sekalipun semua tanda gambar itu mengungkapkan bahwa semua kekuatan sosial politik itu mempunyai Pancasila sebagai satu-satunya asas politik.

Demikianlah kita mengembangkan secara kreatif semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keanekaragaman tidak kita biarkan menggerogoti persatuan, sedangkan persatuan tidak mematikan kemandirian. Alangkah indah dan semaraknya kehidupan kita yang demikian itu.

Dalam usaha menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional menuju masyarakat yang kita cita-citakan, GBHN juga menugasi kita untuk meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi masing-masing. Sebab itu perlu disusun undang-undang dalam rangka memantapkan dan menata organisasi-organisasi kemasyarakatan itu, sekaligus sebagai pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

Usaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan ini dengan sendirinya juga harus kita tempatkan dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Semuanya ini mewarnai semangat dan arah yang ditunjukkan oleh GBHN.

Berlainan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik, maka organisasi-organisasi kemasyarakatan itu memperlihatkan perbedaan dalam bidang kegiatan dan fungsinya.

Mengenai bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kita tetap berpegangteguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, P4 dan GBHN 1983 itu sendiri.

Pancasila bukan agama. Pancasila tidak akan dan tidak mungkin menggantikan agama. Pancasila tidak akan diagamakan. Juga agama tidak mungkin dipancasilakan.

Tidak ada Sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama. Dan tidak ada satu agama pun yang ajarannya memberi tanda-tanda larangan terhadap pengamalan dari Sila-sila dalam Pancasila. Karena itu walaupun fungsi dan peranan Pancasila dan agama berbeda, namun dalam Negara Pancasila ini kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Dalam Negara Pancasila ini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Karena itu jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila, karena kedua-duanya memang tidak bertentangan.

Karena . itu pula, pelaksanaan GBHN 1983 pasti tidak akan bertentangan dengan ajaran-ajaran dari agama-agama itu. Dalam Negara Pancasila kebebasan beragama terjamin sepenuhnya. Sifat dan hekekat dari agama-agama dihargai setinggi-tingginya dan diakui sepenuh-penuhnya.

Sebaliknya dari organisasi keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita diharapkan jaminan bahwa mereka ikut menjamin kelestarian Pancasila, stabilitas nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Untuk memasyarakatkan ideologi Pancasila itu, maka penataran-penataran P4 akan terus dilanjutkan dan diperluas. Malahan harus makin maju lagi. Artinya : dari usaha memberi pengetahuan



ke tingkat pengembangan penghayatan dan selanjutnya ke tingkat mendorong pengamalan dalam pembangunan nasional. Walaupun pengamalan Pancasila itu harus dilihat sebagai keseluruhan, namun ada kalanya pengamalan dari sesuatu Sila perlu mendapatkan prioritas dari Sila yang lain. Dalam masyarakat akan terdapat golongan-golongan yang menitikberatkan pengamalan dari sesuatu Sila, sedang golongan lain memprioritaskan pengamalan dari Sila yang lain. Dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar '45 dan P4 bisa saja tetap timbul pandangan yang berlain-lainan mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk mengamalkan sesuatu Sila. Dengan demikian dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tetap ada tempat bagi perdebatan dan kritik mengkritik, sedangkan semua pihak sama-sama bertekad untuk mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya dalam pembangunan. Perdebatan dan kritik mengkritik dengan disertai rasa tanggung jawab pada dasarnya bersifat positif dan kreatif dalam usaha kita yang terus menerus untuk memberi dinamika dalam masyarakat kita dalam rangka mengamalkan Demokrasi Pancasila. Pancasila bukan dogma yang beku dan kaku. Pancasila adalah penuntun kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamalannya harus kreatif sehingga Pancasila mampu memberi jawaban terhadap perkembangan masyarakat yang makin maju.

Mengenai pengembangan Demokrasi Pancasila maka kita akan memantapkan segala yang telah kita bina dan kita miliki sampai sekarang, disertai dengan pembaharuan dan penyegaran agar dapat menjawab tantangan-tantangan kemajuan. Penyelenggaraan kehidupan bernegara secara konstitusional terus kita mantapkan, kehidupan demokrasi kita suburkan dan hukum makin kita perkuat tegaknya. GBHN memberi petunjuk bahwa mekanisme kepemimpinan nasional perlu kita teruskan pelaksanaannya secara mantap. Demikian pula kita semua bertanggung jawab untuk memantapkan berfungsi dan saling berhubungannya lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara menurut jiwa, semangat dan

ketentuan Undang-Undang Dasar : Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang mampu menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan aspirasi rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin berbobot dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah dan melaksanakan tugas perundang-undangan; Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan yang berwibawa dalam memeriksa tanggung jawab Pemerintah dalam penggunaan uang negara; Dewan Pertimbangan Agung sebagai badan yang memberi nasehat-nasehat kebijaksanaan kepada Presiden; Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang memberikan pengayoman hukum yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan. Dan adalah juga tanggung jawab para Menteri dan kita semua untuk membantu Presiden agar menjalankan Undang-Undang Dasar selurus-lurusnya, menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, melaksanakan segala undang-undang dan peraturan sebaik-baiknya serta melaksanakan GBHN seberhasil-berhasilnya.

Untuk itu lah penting sekali kita lanjutkan dan kita perdalam pendidikan dan kesadaran politik rakyat, yang sekaligus merupakan unsur penting bagi pengembangan kehidupan demokrasi dan terbinanya stabilitas politik yang dinamis. Dalam rangka ini penting sekali usaha-iisaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan sosial politik yang ada dengan memantapkan kemandirian masing-masing, baik di kalangan Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Demokrasi Indonesia atau pun Golongan Karya.

Dalam rangka memantapkan stabilitas politik, dan juga untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan bangsa dan negara, akan ditingkatkan pula kegiatan penerangan dan peranan media massa termasuk pers nasional. Pers bebas dan bertanggung jawab yang makin hari makin teranam di kalangan pers sendiri perlu terus dikembangkan.

Dalam rangka memantapkan stabilitas nasional itu ditingkatkan pula pembinaan dan pengembangan hukum. Hal ini makin penting artinya, karena negara kita adalah negara berkedaulatan

rakyat dan sekaligus negara yang berdasarkan hukum. Karena itu penting sekali tegaknya hukum yang membuat setiap orang merasa tenteram lahir batinnya karena hidup dalam suasana tertib dan merasa ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam rangka ini usaha-usaha untuk memasyarakatkan hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum perlu ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan Demokrasi Pancasila dan pemantapan stabilitas nasional yang dinamis itu, penting sekali peranan ABRI baik sebagai alat pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial. Dwi fungsi ABRI harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, sehingga ABRI dapat ikut mendorong dan menstabilkan perkembangan masyarakat kita ke arah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Untuk itu lah, di samping melanjutkan usaha modernisasi ABRI, maka dalam pembangunan pertahanan keamanan perlu terus kita kembangkan doktrin perlawanan rakyat semesta dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Selanjutnya, Saudara Ketua yang terhormat, saya akan menguraikan secara singkat mengenai Krida keempat, ialah meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dalam hal ini tidak kita artikan secara sempit. Kepentingan nasional tidak perlu kita pertentangkan dengan kepentingan internasional. Kita malahan ikut bertanggung jawab mengenai perkembangan internasional, sebab keadaan internasional yang baik ikut menjamin kepentingan nasional kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar memberi amanat kepada kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal itu memperkuat pandangan kita bahwa kepentingan nasional tadi harus kita pahami secara luas. Dalam rangka mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dan dengan berasaskan

kepada Pancasila kita laksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Karenanya amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 dan Pancasila itulah yang menjadi pedoman dan arah sikap serta dalam menilai perkembangan dunia, sehingga kita mendukung apa yang sejwi dengan Pancasila dan sebaliknya kita tidak mendukung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar '45.

Berbagai ketegangan dan krisis yang selama tahun-tahun terakhir tidak henti-hentinya melanda dunia ini bersumber pada tatanan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tidak menjamin keadilan. Karena itu tepat sekali petunjuk GBHN agar kita memperkuat perjuangan untuk mewujudkan tatanan dunia baru, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru.

Beberapa negara industri maju inengira bahwa pancaroba perekonomian dunia sekarang akan bisa diatasi oleh mereka sendiri, dalam arti, perekonomian dunia akan kembali bangkit jika ekonomi negara-negara industri maju dapat diperbaiki. Sebaliknya, kita bersama-sama negara-negara yang sedang membangun lainnya yakin bahwa perbaikan ekonomi dunia hanya akan terwujud jika ditangani bersama-sama oleh semua bangsa dan semua negara yang kaya maupun yang miskin, yang maju industrinya maupun yang sedang membangun, yang besar maupun yang kecil. Alasannya sangat jelas : karena sekarang peranan negara-negara yang sedang membangun sudah bertambah besar dalam kehidupan perekonomian dunia dan percaturan dunia lainnya. Justru untuk melaksanakan pembangunannya, negara-negara yang sedang membangun memerlukan modal dan peralatan yang dihasilkan oleh negara industri maju. Pada gilirannya, hal ini akan membangkitkan ekonomi negara-negara industri maju.

Agar dapat membeli peralatan, maka negara-negara sedang membangun harus memiliki devisa yang besar, yang hanya dapat diperoleh dengan menaikkan ekspor. Padahal, ekspor dari negara-negara yang sedang membangun itu sekarang mengalami kesulitan karena lesunya perekonomian negara-negara industri maju.

Kesulitan bertambah, karena negara-negara industri maju memasang berbagai pagar dan hambatan yang tidak perlu. Di samping itu, aliran modal dari negara industri maju ke negara-negara yang sedang membangun juga mengalami keseretan, baik karena negara-negara industri maju mencoba mengatasi kesulitan mereka secara sendiri-sendiri dan lebih-lebih lagi karena pengeluaran mereka yang luar biasa besarnya untuk perlombaan senjata.

Karena itu, perbaikan perekonomian dunia secara bersama-sama dengan membentuk Tata Ekonomi Dunia Baru merupakan keharusan. Hal ini bukan hanya merupakan kepentingan negara-negara yang sedang membangun saja, melainkan juga kepentingan negara-negara industri maju. Kepentingan semua bangsa, semua negara dan seluruh umat manusia.

Walaupun berkat pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan telah membawa bangsa kita pada tingkat bangsa yang berpenghasilan menengah, namun, kesadaran kita mengenai perlunya membangun dunia yang tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial mendorong tanggung jawab kita untuk menyerukan kepada negara-negara industri maju agar menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengulurkan tangan membantu negara-negara yang sangat miskin. Tanggung jawab itu pula, yang mendorong kita, memberikan bantuan teknik kepada sesama negara yang sedang membangun, sesuai dengan kemampuan terbatas yang ada pada kita.

Dengan rasa tanggung jawab itu, kita akan terus melanjutkan perjuangan pembangunan Tata Ekonomi Dunia Baru di semua forum yang tersedia.

Rasa tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia juga mendorong kita untuk menyerukan kepada negara-negara besar di dunia untuk mengakhiri perlombaan senjata yang bukan hanya tidak ada gunanya, malahan hanya akan saling menghancurkan.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan nasional dan menentang penjajahan dalam segala bentuknya, kita terus menerus akan ikut berusaha agar hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka di tanah airnya sendiri dihormati. Demikian pula hak-hak rakyat Afganistan, rakyat Kampuchea dan rakyat-rakyat lainnya, dengan penarikan mundur semua pasukan asing dari wilayah mereka. Pendek kata semua negara hendaknya menjauhkan diri dari campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain, dalam bentuk apapun juga.

Kita merasa berbahagia, karena di kawasan ini kita memiliki Asean, yang makin hari makin kukuh. Kita akan terus memperkuat Asean bersama-sama dengan negara-negara anggota lainnya, dengan memperluas kerjasama yang dapat kita bina sampai sekarang, dengan terus menjalin saling percaya dan memperdalam persahabatan yang tulus ikhlas. Kekukuhan Asean telah menjadi bagian dari kepentingan kita, dan kita yakin, juga menjadi kepentingan semua negara anggotanya.

Saudara Ketua yang terhormat;

Krida kelima adalah melaksanakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Seperti telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR mengenai Pemilihan Umum dan dalam GBHN, pelaksanaan Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali dilaksanakan berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Walaupun Pemilihan Umum yang akan datang masih akan berlangsung empat tahun lagi, namun segala persiapan harus kita lakukan dari sekarang juga agar Pemilihan Umum nanti berlangsung makin baik lagi dari Pemilihan-pemilihan Umum yang telah beberapa kali kita laksanakan sampai sekarang. Berbagai undang-undang harus kita siapkan untuk melaksanakan konsensus nasional yang telah kita sepakati bersama dalam Sidang Umum MPR yang lalu, seperti penambahan jumlah anggota

dari lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat, mengenai peninjauan kembali pengangkatan sepertiga jumlah anggota MPR dalam hubungannya dengan referendum sebagai pengamanan kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar '45 dan sebagainya. Penyiapan pembaharuan undang-undang yang penting itu harus kita tempatkan dalam rangka usaha untuk menciptakan kerangka landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya, dalam rangka mengamalkan dan mengembangkan Demokrasi Pancasila. Dengan semangat dan jiwa persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, kita percaya bahwa perubahan berbagai undang-undang itu akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, masalah-masalah dan tantangan-tantangan serta apa yang ingin kita kerjakan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Kita hidup dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat dan yang mengalami berbagai krisis yang berat. Pada satu pihak kita mengalami dampak dari perubahan-perubahan dan krisis-krisis itu. Pada pihak lain, dalam batas-batas kemampuan kita, maka kita bertanggungjawab untuk ikut mengendalikan dan mengarahkan perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di dunia ini ke arah yang memberi kebaikan bagi semua manusia dan kemanusiaan. Setidak-tidaknya kita ikut mengusahakan sekuat tenaga agar keadaan tidak lebih parah dari yang dialami dunia sekarang ini. Dalam batas-batas kemampuan kita maka kita ikut bertanggungjawab, tidak hanya menanggulangi akibat-akibat dari krisis-krisis yang tengah melanda dunia, tetapi juga ikut mencari jalan keluar mengatasi sebab-sebab yang mendasar dari krisis-krisis tadi. Dengan dibimbing oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun sumbangan kita yang utama di tengah-tengah perubahan dan krisis dunia tadi ialah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita membangun tidak dengan mencontoh begitu saja masyarakat-masyarakat moderen sekarang ini yang sedang dilanda oleh beraneka ragam krisis, melainkan dengan membangun masyarakat Indonesia moderen yang mencerminkan kepribadian dan cita-cita sendiri.

Kita harus mengejar ketinggalan kita dan mengatasi keterbelakangan kita di berbagai bidang, dengan arah yang tepat dan disertai kewaspadaan yang tinggi, agar kita tidak terjerumus ke dalam berbagai krisis yang akhirnya menimpa masyarakat-masyarakat yang jauh lebih maju dari kita di bidang ilmu, teknologi, industri, pertanian dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman masyarakat-masyarakat moderen lainnya, lebih-lebih belajar dari kesalahan mereka, maka dalam upaya membangun masyarakat moderen, kita sekaligus berusaha mewujudkan keadilan sosial, melestarikan budaya bangsa yang penuh ajaran keluhuran budi, menjaga lingkungan hidup dan memelihara sumber-sumber daya alam.

Itu berarti kita harus membangun masyarakat maju yang adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Itu lah pula yang kita maksud dengan membulatkan tekad kepada diri kita sendiri, bahwa pembangunan ini kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila.

Setelah berjuang sangat panjang dan penuh penderitaan dan pengorbanan untuk kembali hidup terhormat sebagai bangsa merdeka sejak penjajahan menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi tercinta ini, setelah tumbuh dan berkembang mulai kebangkitan nasional di tahun 1908, setelah dimantapkan oleh Sumpah Pemuda di tahun 1928, maka pada tanggal paling bersejarah bagi kita, 17 Agustus 1945, Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang kemerdekaan itu berdiri di atas dasar yang kuat,



yang terbukti tahan terhadap ujian sejarah, yang makin menyatukan kita dan akan mengayomi kita selamanya, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Kini, 38 tahun setelah kita berjalan bersama erat bergandengan tangan, dengan segala suka dukanya, dengan semua harapan dan kekecewaannya, pintu gerbang kemerdekaan itu telah makin jauh kita lewati. Kini, kita sedang bersiap-siap melaksanakan tugas sejarah yang tidak kalah besarnya, ialah memasuki pintu gerbang berikutnya, dengan menanamkan kerangka landasan yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berkeadilan. Sebagai kelanjutan sejarah perjuangan, pembangunan itu kita wujudkan sebagai pengamalan Pancasila. Dengan tekad itu lah kita masuki tahun depan sebagai tahun pertama Repelita IV.

Kita menyadari bahwa perjalanan kita untuk membangun masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila akan menghadapi bangsa dan negara kita kepada berbagai macam tantangan.

Justru karena itu lah kita harus meletakkan landasan yang kukuh kuat bagi pertumbuhan bangsa dan negara kita dalam memasuki tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya, yaitu untuk tinggal landas menuju masyarakat moderen yang adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Tugas sejarah kita ialah melanjutkan dan meningkatkan karya besar dari pendahulu-pendahulu kita, yang dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, yang dengan segala keikhlasan dan ketulusan hatinya, telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Itulah renungan kita yang terdalam saat ini mengenai tugas sejarah di depan kita, yang kita pandang sebagai kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan dari sejarah kita di masa lampau. Itu lah pula yang menjadi tekad dan harapan kita pada saat menyongsong peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan dalam tahun '83 ini, dengan menyegarkan, memperdalam dan memperbaharui

kesadaran kita : mengenai keadaan kita sebagai bangsa dan sebagai negara sekarang ini, dari manakah kita telah berangkat dan ke arah manakah kita akan melanjutkan perjalanan.

Dengan tekad membaja untuk terus membangun, dengan penuh harapan dan kepercayaan mengenai hari esok yang bahagia, maka dengan sedalam-dalamnya kita pun menyadari bahwa kita akan memasuki tahun-tahun berat yang penuh dengan ujian dan tantangan.

Dengan tradisi sebagai bangsa pejuang yang telah keluar dengan selamat dari ujian-ujian berat di masa silam, pembangunan di masa datang juga akan kita kerjakan dengan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Sebagai bangsa yang kuat rasa keagamaannya, sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita masuki tahun ke-39 Kemerdekaan Nasional kita dengan terus memohon bimbingan dan kekuatan lahir batin kepadaNya, Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah.

Dengan semuanya itu, mari lah kita masuki tahun ke-39 Kemerdekaan Nasional kita dengan semangat yang tak kenal padam sebagai bangsa pejuang untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO